

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manaf. (2016). *Modul Materi “Good Governance dan Pelayanan Publik.”*
- Agus Widiyarta, & Ertien Rining N. (2016). *Pelayanan Kesehatan dari Perspektif Participatory Governance.*
- Aldino Akbar Nasution, O. (2015). *Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kantor Unit Pelayanan Terpadu Vi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.*
- Andri Irawan. (2018). *Transparansi Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP). 10.*
- Antonius Tarigan. (n.d.). *”Urgensi Penguatan Keuangan Daerah” Suatu Tinjauan Terhadap Regulasi Daerah & Implikasinya Dalam Penyediaan Pelayanan Publik.*
- Badan Pemeriksa Keuangan. (n.d.). *Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017.*
- Broadbent, J., & Guthrie, J. (2008). Public sector to public services: 20 years of “contextual” accounting research. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 21(2), 129–169. <https://doi.org/10.1108/09513570810854383>
- Bruns, H. J. (2014). Accounting change and value creation in public services-Do relational archetypes make a difference in improving public service performance? *Critical Perspectives on Accounting*, 25(4–5), 339–367. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2013.05.005>
- David E. Osborne, & Gaebler Ted. (1992). *Reinventing Government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector.*
- Donald W. Barclay. (1995). *The Partial Least Squares (PLS) Approach to Causal Modeling: Personal Computer Use as an Illustration.*
- Dr. Antonius Alijoyo. (n.d.). *Makna Akuntabilitas dan Responsibilitas: Konteks Manajemen Kepatuhan.* The Institute of Compliance Professional Indonesia (ICoPI). Retrieved July 4, 2021, from <https://icopi.or.id/makna-akuntabilitas-dan-responsibilitas-konteks-manajemen-kepatuhan/>
- Ernawati Fauziah. (2017). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015.*
- Fitrotush Sholihah. (2017). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.*

- Furqan, A. C., Wardhani, R., Martani, D., & Setyaningrum, D. (2020). The effect of audit findings and audit recommendation follow-up on the financial report and public service quality in Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*, 33(5), 535–559. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-06-2019-0173>
- Gina Purwadina. (2017). *Pengaruh Kekayaan Daerah, Kompleksitas Pemerintahan Daerah, Umur Administratif Pemerintahan Daerah, Ketergantungan Daerah Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah*.
- Grover Starling. (2008). *Managing the Public Sector* (8th ed.). Boston, MA: Thomson Wadsworth.
- Hafidh Susila Sudarsana, & Shiddiq Nur Rahardjo. (2013). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)*.
- Hermin Arifianti, Payamta, & Sutaryo. (2013). *Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)*.
- Hutton, w. (2006). *Deliberative democracy and the role of public managers Final report of The Work Foundation's public value consortium-November 2006 Deliberative democracy and the role of public managers 2 Contents*.
- Irvan Yoga Pardistya, & Syamsul Huda. (2016). *Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Internal Terhadap Kualitas Pelayanan*.
- Jatmiko Wahyu Prabowo, T., Leung, P., & Guthrie, J. (2017). Reforms In Public Sector Accounting And Budgeting In Indonesia (2003-2015): Confusions In Implementation. In *Accounting & Financial Management* (Vol. 29, Issue 1).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. In *Journal of Financial Economics* (Vol. 3). Q North-Holland Publishing Company.
- John Hulland. (1999). *Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: a review of four recent studies*.
- Kemenkeu RI, & Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. (n.d.). *Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Kementrian PPN, & BAPPENAS. (2020). *Pedoman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja*.
- Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002. (n.d.). *Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha*

Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2008). *Kedudukan Peran dan Kelembagaan DPRD Dalam Konteks Good Governance.*
- Kurnia, D. (2020). Pengaruh Temuan Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Struktur Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Revenue*, 01(01). <https://doi.org/10.46306/rev.v1i1>
- Lampiran PERPRES Nomor 131 Tahun 2015. (n.d.). *tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.*
- Lembaga Adimistrasi Negara. (1998). *Pelayanan Publik.*
- Lembaga Administrasi Negara. (2017). *Modul Pelatihan Dasar Calon Pns.*
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Ed. rev., cet 2). Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Mark Moore. (1995). *Creating Public Value: Strategic Management in Government.*
- Mirta Wijaya, Neri Susanti, & Sulisti Afriani. (n.d.). *Hubungan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.*
- Mohammad Iqbal. (2007). *Pelayanan yang Memuaskan.* Alex Media Komputindo.
- Mohammad Mahsun. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik.* BPTE.
- Muhammad Fitri Rahmadana, & dkk. (2020). *Pelayanan Publik* (Janner Simarmata, Ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Noel Hyndman, & Ciaran Connolly. (2011). *Accruals Accounting in the Public Sector: A Road not always Taken.* 22(1).
- Novia Sintia Hardi, & Asnidar. (2019). *Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa* (Vol. 3, Issue 1).
- Nuriyanto. (2014). *Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep "Welfare State"?* <http://www.kompas.co.id/>
- P. Jones, & J. Bates. (1990). *Public Sector Auditing: Practical Technique for an Integrated Approach.* Chapman &Hall.
- Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017. (n.d.-a). *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.*

- Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017. (n.d.-b). *tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan.*
- PERMENDAGRI Nomor 4 Tahun 2018. (n.d.-a). *tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.* www.peraturan.go.id
- PERMENDAGRI Nomor 4 Tahun 2018. (n.d.-b). *tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.* www.peraturan.go.id
- PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2020. (n.d.). *tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- PERMENDAGRI Nomor 70 Tahun 2019. (n.d.). *tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.*
- PERPRES Nomor 29 Tahun 2014. (n.d.). *tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*
- PP No. 60 Tahun 2008. (n.d.). *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*
- PP Nomor 8 Tahun 2006. (n.d.). *tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.*
- PP Nomor 12 Tahun 2019. (n.d.). *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- PP Nomor 24 Tahun 2005. (n.d.). *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*
- PP Nomor 36 Tahun 1972. (n.d.). *tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah.*
- PP Nomor 56 Tahun 2005. (n.d.). *tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.*
- PP Nomor 60 Tahun 2008. (n.d.-a). *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*
- PP Nomor 60 Tahun 2008. (n.d.-b). *tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*
- PP Nomor 71 Tahun 2010. (n.d.). *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*
- PP Nomor 96 Tahun 2012. (n.d.). *Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.*
- Imam Ghozali, M. C. A. C. (2017). *Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan IBM SPSS 24.* UNDIP.
- Imam Ghozali, M. C. Ph. D. C. A. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.).
- Imam Ghozali, M. Com. m Ph. D. , C. A. (2019). *Mediasi dan Moderasi dalam Analisis Statistik* . Yoga Pratama.

- Putri, E. D. (2016). *Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur*.
- Rahmadi Murwanto, Adi Budiarmo, & Fajar Hasri Ramadhana. (n.d.). *Audit Sektor Publik*. Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah (LPKPAP).
- Renas Adi Nugroho. (2014). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*.
- Restu Inayah. (2016). *Analisis Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Lahat*. 10(2).
- Robert Denhardt, & Janet Vinzant Denhardt. (2003). *The New Public Service: Serving, Not Steering*.
- Rudi Rinaldi. (n.d.). *Analisis Kualitas Pelayanan Publik*.
- Rycha Kuwara Sari, Choirael Woestho, & Milda Handayani. (2019). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah pada Daerah Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah. In *Ragunan, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan* (Vol. 21, Issue 1). <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JKI>
- Samuel Christina Ara, Titiek Herwanti, & Endar Pituringsih. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemda Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemda Kabupaten Di Pulau Sumba. In *JAFFA* (Vol. 04, Issue 1).
- Setyaningrum, D. (n.d.). *The Direct and Mediating Effects of An Auditor's Quality and the Legislative's Oversight on the Follow-up of Audit Recommendation and Audit Opinion*.
- Siti, N., Program, M., Bisnis, S. A., & Kridatama Bandung, P. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. In *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi: Vol. VI* (Issue 1).
- Tamawiwiy, J., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (n.d.). *Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sulawesi Utara)*.
- UU Nomor 15 Tahun 2004. (n.d.-a). *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- UU Nomor 15 Tahun 2004. (n.d.-b). *tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- UU Nomor 22 Tahun 1999. (n.d.). *tentang Pemerintah Daerah*.
- UU Nomor 25 Tahun 2009. (n.d.). *Pelayanan Publik UU Nomor 25 Tahun 2009*.

Wendy Endrianto. (2010). *Analisa Pengaruh Penerapan Basel dan Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Risiko pada PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk.*

Wynne W. Chin. (2010). *Handbook of Partial Least Squares.*

Zainal Abidin, S. (n.d.). *Sistem Pengelolaan Pemerintahan Daerah dalam Era Reformasi.*

